



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SARWONO**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN SUMBER DAYA MANUSIA, KEUANGAN DAN LOGISTIK**
3. NHK : **546909**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.075.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m²/36 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.050 m²/415 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 6.000 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 1.750.000.000
4. Tanah Seluas 171 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
5. Tanah Seluas 2.180 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 496.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOBIL, HONDA HR-V RU1 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
4. MOBIL, HONDA NEW CITY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
5. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 27.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	69.515.129
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.667.515.129
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.667.515.129

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.